

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan “*mega cultural diversity*” karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda.

Rupert Emerson pernah mentakan bahwa bangsa adalah masyarakat luas yang apabila dalam keadaan krisis, secara efektif memimpin loyalitas orang-orang, yang untuk tujuan sekarang merupakan akhiran yang efektif dari perjalanan manusia sebagai binatang sosial dan tujuan akhir dari solidaritas yang berlaku di antara manusia. Bangsa harus dilihat sebagai masyarakat yang membuat pendekatan yang paling dekat untuk merangkul semua aspek kehidupan, keluarga, suku-suku, dan kelompok keagamaan (Rupert Emerson, 1975: 25).

Agama-agama yang hidup di Indonesia mencerminkan pluralitas keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu sering disebut sebagai agama resmi negara karena enam agama inilah yang banyak mendapatkan fasilitas secara khusus oleh negara. Meskipun keenam agama ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut agama lainnya, seperti Baha’i, Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi oleh keyakinan para leluhur diberikan kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat.

Kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat plural (*plural society*) telah hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat hidup rukun dalam gerak sosial, ekonomi, agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia

hidup harmoni dan damai sejak beratus-ratus tahun meskipun berbeda agama. Di beberapa daerah, perbedaan agama justru terjadi di dalam satu keluarga, yang diikat oleh satu adat istiadat.

Dilihat hampir dari seluruh sudut pandang – geologis, historis, dan budaya Indonesia adalah kompleks. Oleh karena itu, bukan tidak beralasan semboyan resmi negara, “Bhinneka Tunggal Ika” (bercerai-berai tapi tetap satu), dicanangkan oleh para pendiri negara Indonesia untuk menekankan keberagaman etnik, dan kesatuannya. Walaupun ada perbedaan etnik yang meliputi lebih dari 500 bahasa daerah, rakyat Indonesia disatukan oleh bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia (Wahid Hasyim 2001: 18).

Namun, pada era globalisasi masa kini, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antaragama, adalah fenomena nyata. Di masa lampau kehidupan keagamaan relatif lebih tenang karena umat-umat beragama bagaikan kamp-kamp yang terisolasi dari tantangan-tantangan dunia luar. Sebaliknya, masa kini tidak sedikit pertanyaan kritis yang harus ditanggapi oleh umat beragama yang dapat diklasifikasikan rancu dan merisaukan.

Merebaknya fundamentalisme dan kultus dengan kecenderungannya yang lebih mengutamakan kamapanan suatu doktrin agama dan berpijak pada sikap literer yang sangat kaku dan kurang toleran terhadap kelompok lain. Kenyataan ini paradoks dengan postmodernisme yang secara epistemologis menolak pemutlakan semacam itu. Akibatnya, secara sosiologis agama yang pada awalnya mengandaikan kehidupan yang rukun, adil, dan sentosa pada kenyataannya seringkali menjadi biang konflik. Seperti yang dikutip oleh Odea (F. Odea 1992: 139), “Kita mempunyai cukup agama hanya untuk membuat kita saling membenci, tidak cukup untuk saling mencintai”.

Belum lagi soal kemajemukan, yang kini sudah menjadi fenomena mustahil untuk dihindari. Manusia menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing. Dalam suasana yang beragam ini, ditambah klaim kebenaran (*truth claim*) dan watak misioner dari setiap agama, menjadikan umat beragama sebagai kelompok masyarakat yang amat rentan dengan konflik. Konflik yang cenderung disakralkan karena selalu mengatasnamakan agama (baca: kebenaran).

Memang, pada satu sisi agama merupakan potensi bagi terwujudnya persatuan (*integritas*) tetapi pada wajah lain merupakan suatu faktor pemecah (*desintegrasi*). Dengan bahasa lain, agama mengemban fungsi memupuk persaudaraan (internal) tetapi sekaligus pemecah persatuan (eksternal) (Hendro Puspito 1994: 51).

Isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah yang dapat menjadi pemicu terjadinya perang keyakinan. Agama sering menimbulkan sikap tidak toleran. Legalitas agama hanya menyatukan orang tertentu dan memisahkan yang lainnya. Inilah paradoks agama yang dimaksud.

Agaknya persoalan-persoalan di atas merupakan agenda intelektual bagi semua elit agama yang ada. Harapannya adalah sesegera mungkin menghadirkan rancang bangun pemahaman keagamaan (teologi) alternatif sebagai rekonstruksi terhadap pemikiran (pemahaman) lama yang dianggap kurang memberikan sistem makna yang jelas, tidak membebaskan dan terjebak pada *status quo*. Karena itu perlu dikembangkan suatu pemikiran, bahwa agama merupakan wacana kemanusiaan yang terbuka dan siap berhadapan dengan persoalan baru dan penafsiran baru pula. Dengan demikian, tidak ada suatu wacana keagamaan yang sudah final (Siti Nadroh 1998: 4).

Oleh karena itu, persoalan utama yang kemudian muncul adalah bukan pada masalah agama apa, tapi beragama yang bagaimana? Dalam hal ini dengan merujuk pada Fromm, Nurcholish Madjid pernah mengatakan,

“... persoalannya bukanlah terutama bagaimana mendorong manusia untuk beragama, melainkan bagaimana manusia menemukan atau cara memeluk agama dan menghayatinya begitu rupa sehingga tidak membuatnya malah lumpuh secara keruhanian, melainkan yang akan mengembangkan lebih lanjut nilai kemanusiaannya sendiri dan membuat mekar potensi spesifiknya sebagai manusia”.

Maka, persoalan fenomena keagamaan pada masa sekarang adalah persoalan pemikiran (paradigmatik) yang membuahkan suatu tindakan atau sikap-sikap tertentu (praktik keberagamaan); dan persoalan pemasaran (misioner/ penyebaran/ dakwah) agama yang tidak santun dan seringkali menampilkan kesan eksklusif yang tak jarang berakhir dengan kekerasan.

Indonesia sebenarnya merupakan bangsa yang pada dasarnya telah berhasil menahan gejala kekerasan yang terjadi atas nama agama tersebut. Indonesia memiliki kebudayaan adiluhung, di mana itu merupakan sebuah ruang dialog bagi adanya hal-hal keberbedaan. Ini dapat dilihat, dari falsasah keberbangsaan yang berbunyi, *bhineka tunggal ika*. Bukankah slogan itu merupakan hasil galian para *founding father* bangsa Indonesia dari khazanah kebudayaan yang ada. Artinya, secara historis, Indonesia merupakan bangsa yang mampu menyelesaikan keberbedaan itu secara harmonis. Jadi, kekuatan harmonisasi keberagaman di Indonesia itu melalui ruang budaya.

Dapat pula dijumpai dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini melalui jalur kebudayaan. Hasilnya, Islam menyebar tidak lewat konflik. Malah, pada gilirannya Islam dijalankan dengan formulasi baru yang khas Indonesia. Di mana islam didialogkan dengan konteks kebudayaan Indonesia.

Pada sisi yang lain, para pelaku tindak kekerasan atas nama agama tidak terlihat sebagai kelompok yang mengakimodir budaya local asli Indonesia. Alih-alih, dalam pandangannya, berbagai budaya asal Indonesia dinilainya sebagai sesuatu yang tahayul, khurafat, bid'ah, klenik, dsb.

Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menengok kembali realitas keberagaman masyarakat Indonesia yang plural. Jika pluralisme itu *given*, sementara konflik adalah sesuatu yang *inhern* di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya bagaimana mengelola pluralitas dan konflik yang ada sehingga menjadi sebuah energi sosial bagi penciptaan tatanan bangsa yang lebih baik. Jawabannya tentu panjang dengan melibatkan pengkajian seluruh faktor yang ada. Akan tetapi terkait dengan kajian ini (memahami pluralitas), ternyata menjaga kerukunan tidak cukup hanya memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita secara apatis dan pasif.

KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, telah berupaya menjawab tantangan itu, lewat konsepsi pemikirannya yang humanis. Melalui gagasannya ini, Gus Dur merespon secara intens dengan mengajukan alternatif antitesa sebagai penyelesaian atau mungkin juga ‘wacana *counter*’ terhadap gejala keagamaan masyarakat modern yang kering, paradoks, ahistoris, eksklusif, dlsb. sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Ia masih melirik akan pentingnya tradisi, kebudayaan lokal Indonesia. Karena itu, yang ditawarkan adalah lokalisasi Islam, bukannya artikulasi dari keislaman yang harus serba seragam, apalagi serba arab. Dia yakin bahwa Islam akan lebih mudah dihayati oleh masyarakat mad’u (objek dakwah), apabila para da’i atau muballigh (penyebar agama) terlebih dahulu memperhatikan kebudayaan setempat pada saat Islam disebar dan ditafsirkan ulang. Keberislaman yang disampaikan dengan cara seperti ini akan lebih mampu mengakomodir cipta, rasa, dan karsa para pemeluknya, sesuai dengan penghayatan budayanya yang sudah terjadi selama berabad-abad.

Watak dinamis yang melekat dalam pemikiran Gus Dur, menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan keberagaman yang ada, mulai dari gagasan pribumisasi islam, menegaskan Pancasila sebagai asa tunggal, dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan secara menyeluruh.

Pemikiran dan sikap Gus Dur mencerminkan hal-hal mendasar yang menjadi ciri syariat Islam dalam kerangka pribadi humanis dan pengejawantahan daripada *maqosihid as – syariah* (tujuan syariat), yaitu: Pertama, kepedulian kepada kepentingan kemanusiaan dalam arti luas. Kedua, watak dinamis yang melekat di dalamnya sebagai cermin dari sifat transformatif ajaran islam. Ketiga, kesediaan untuk bersikap terbuka terhadap ajaran dan peradaban lain sebagai manifestasi kosmopolitanisme peradaban Islam (Muhaimin Iskandar, 2007: 13).

Islam adalah agama yang secara tegas mengatakan bahwa kehadirannya hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*). Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi semua umat manusia tanpa memandang agama, suku dan asal-usul kebangsaan. Tanpa bisa menjadi “rahmat” bagi semua umat, Islam bisa jadi telah kehilangan *rasio d'entre-nya*.

Penelitian ini, ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis lebih dalam mengenai konsepi pemikiran Gus Dur tentang gagasan pengembangan dan pembangunan umat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat ditemukan signifikansi-nya untuk dijadikan kerangka dakwah pengembangan masyarakat Islam. Untuk itu penelitian ini mengambil judul, **“Konsep Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Kerangka Pemikiran Abdurahman Wahid”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka melalui penelitian ini terdapat masalah-masalah yang dapat dirinci dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontruksi pemikiran pengembangan masyarakat islam menurut Gus Dur ?

2. Bagaimana metode dan pendekatan pengembangan masyarakat Islam Gus Dur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep pengembangan masyarakat Islam menurut Gus Dur
- b. Untuk mengetahui konteks keberagaman masyarakat Islam dengan pendekatan dengan pendekatan pemikiran Gus Dur

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diarahkan pada perkembangan ilmu (pengetahuan ilmiah) guna memperkaya khasanah keilmuan yang telah ada, terutama dalam kajian pengembangan masyarakat Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai signifikansi sosial, yang diarahkan pada pemecahan masalah dan pengembangan masyarakat dalam bidang kajian dan seputar permasalahan mendakwahkan agama Islam dengan tanpa harus menyinggung kelompok agama lain, sehingga terjadi harmoni sosial dalam kehidupan beragama dan bernegara.

D. Kerangka Berpikir

Islam dihadirkan sebagai sumber nilai yang menjadi landasan etis untuk melakukan transformasi sosial secara menyeluruh. Islam adalah agama yang membebaskan masyarakat (*a liberating religion*) dari struktur yang tidak adil dan menindas.

Mengacu pada firman Allah SWT., yang secara tegas dalam Q.S al-Anbiya: 107.

atas kekerasan dan penindasan, dan mengajak mereka kepada hukum dan keadilan. Melalui hukum, hak-hak dan kewajiban individu dapat didistribusikan secara benar dan adil. Bagi mereka yang merugikan orang lain, akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Ketiga, terkait dengan tingkah laku manusia yang tidak mungkin diawasi oleh hukum, dakwah menyeru kepada kesadaran moral manusia. Nilai-nilai moral sejati pun tidak mungkin dipaksakan, ia adalah tuntunan batin yang mengendap di bawah alam sadar manusia. Sebuah peradaban akan berumur panjang, jika kemajuan fiskalnya ditopang oleh nilai-nilai kemanusiaan ini. Dakwah menyadarkan manusia untuk menjunjungnya dan menjadikannya sebagai norma-norma masyarakat yang tidak tertulis, seperti ketauhidan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesucian hidup.

Keempat, dakwah menyeru kepada egalitarianisme, emansipasi, dan kesetaraan gender. Peradaban Islam yang harus dibangun melalui dakwah tidak bisa tidak, perlu mengafirmasi dan mengaplikasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam arti luas, termasuk menghormati peranan perempuan, tak hanya dalam sektor domestik, tetapi juga dalam ranah dan ruang publik.

Sejalan dengan pendapat Asghar Ali Engineer, dengan inspirasi wahyu ilahiyah Nabi Muhamad mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploratif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki) (Asghar Ali Engineer, 1993:16). Karena itu, para penguasa Mekkah lebih merasa terusik oleh implikasi-implikasi revolusioner teologi Muhamad ketimbang dakwahnya yang menentang berhala.

Dari perspektif sejarah nusantara, para wali juga melanjutkan apa yang dicontohkan Nabi. Mereka menjabarkan nilai-nilai Islam di daerah-daerah yang sedang mengalami kekacauan nilai dan struktur sosial di saat imperium Majapahit mengalami penurunan. Dengan dakwahnya yang anti – kekerasan, Walisongo bukan hanya berhasil mengislamkan tanah Jawa, tetapi juga berhasil

membangun landasan yang kokoh bagi transformasi nilai dan struktur masyarakat berlandaskan ajaran agama dan tradisi setempat yang membebaskan.

Pandangan hidup demikian juga dipegang secara kuat oleh para Kiai generasi penerus wali. Kisah para kiai yang “babat” mendirikan pesantren dengan sengaja di daerah-daerah “hitam” dan “rawan” di pinggiran kota adalah bukti nyata dari kecenderungan untuk menggunakan pendidikan pesantren sebagai alat transformasi kultural yang berlangsung secara perlahan tetapi menyeluruh.

Namun, dalam kehidupan modern di mana hubungan antar – bangsa semakin terintegrasi dan pertukaran nilai-nilai antar – budaya tidak bisa dielakan, tantangan kehidupan masyarakat juga semakin kompleks. Sikap yang mengakomodasi nilai-nilai luar tanpa *reserve* seringkali membuat masyarakat kehilangan identitas, kemandirian, dan martabatnya. Namun, sikap menolak nilai-nilai baru secara *apriori* juga hanya membuat terjebak dalam arogansi dan kemunduran yang nyata.

Dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat Imam Ghazali merumuskan konsep dasar agama dalam apa yang disebut yang disebut sebagai “tujuan syariaat” (*maqoshid as – syariah*). Dalam kitabnya al – Mustasyfa Jilid I, hlm. 278, Imam al – Ghazali mengatakan tujuan syariat ada lima. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan Gus Dur sebagai berikut; Pertama, upaya untuk melindungi keselamatan fisik warga negara untuk melindungi dari tindakan badani dari luar ketentuan hukum (*hifz an – nafs*). Kedua, melindungi keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifz ad – din*). Ketiga, melindungi keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an – nasl*). Keempat, melindungi keselamatan harta benda dan hak milik pribadi diluar prosedur hukum (*hifz al – mal*). Kelima, melindungi keselamatan profesi (*hifz al – aql*).

Berangkat dari teori besar tersebutlah, upaya penyelesaian probelematika aktual dan mendinamisasi pandangan hidup masyarakat sehingga mampu mewujudkan harmonisasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Melalui penyatuan pandangan tersebut akan menciptakan tatanan civil society (masyarakat madani) yang utuh dan kokoh dalam menopang seluruh ruang dimensi kehidupan masyarakat.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang berkenaan dengan bahasan penelitian, yaitu “Konsep Pengembangan Masyarakat Islam Gus Dur”.

2. Metode Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian literatur (library research) maka penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengungkap isi pesan, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam sebuah data dan dokumentasi.

Content analysis, merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu masalah secara lebih komprehensif dan holistik. Atau dengan kata lain, merupakan suatu metode untuk menganalisis substansi dari tulisan-tulisan yang terkandung dalam literatur. Karena itu, metode analisis isi digunakan penulis untuk sedapat mungkin menjelaskan alur pemikiran alur pemikiran Gus Dur seobjektif mungkin sesuai persektifnya.

Yang dimaksud metode analisis isi di sini adalah dengan cara menjabarkan (analitis) dan memadukan (sintetis) penemuan fakta-fakta atau data seadanya (*fact finding*) tentang prinsip-prinsip, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan tentang “Konsep Pengembangan

Masyarakat Islam dalam Kerangka Pemikiran Gus Dur” yang kemudian dikembangkan dengan penafsiran yang *adequated* terhadap fakta-fakta yang ditemukan.

3. Sumber Data

Karena bercorak *library research* (studi kepustakaan), maka penyusunan sumber data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan berbagai literatur yang kemudian terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi pokok telaah penelitian ini untuk menemukan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran obyek penelitian, yakni buku-bukunya yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu tentang “Konsep Pengembangan Masyarakat Islam Menurut Gus Dur”, diantaranya: Bunga Rampai Pesantren, Biografi Gus Dur, Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil, Pergulatan Agama Dan Kebudayaan, Pergulatan Agama dan Negara; Islam, Negara dan Demokrasi; Beyond The Symbol, Jejak Antropologis Pemikiran Gus Dur, Zaman Baru Islam Indonesia; Neo-Modernisme Islam di Indonesia;; dll.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku lain dan atau referensi-referensi lain yang mendukung bahasan penelitian mengenai Konsep Pengembangan Masyarakat Islam Gus Dur.

c. Jenis Data

Karena berupa pernyataan-pernyataan dalam berbagai bentuk tulisan, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang didalamnya berisi tentang rumusan-rumusan konsep mengenai “Konsep Pengembangan Masyarakat Islam Gus Dur”.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mencari, menemukan dan kemudian menyiapkan data-data yang telah ada untuk diteliti. Kemudian karena berupa penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumentasi resmi, catatan harian, autobiografi, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, makalah, atau majalah, surat kabar, dan sebagainya sejauh itu berkaitan dan mendukung upaya penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menyalin terhadap sumber-sumber data yang telah dipersiapkan (Cik Hasan Bisri, 1997: 64-66), dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

- 1) Menelaah indeks, yaitu data yang menjelaskan di halaman berapa suatu tema atau nama orang dari sumber data itu diambil.
- 2) Menandai bab-bab yang kiranya mempunyai kaitan langsung dengan isi judul yang akan disusun dengan menelaah isi buku, kemudian
- 3) Mengutip bagian-bagian penting yang berkaitan erat dengan judul atau masalah yang dibahas (Bohar Suharto, 1989: 156).

5. Analisis Data

Analisis merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disusun. Analisis juga dilakukan untuk menemukan makna dari

data yang ditemukan untuk memberikan penafsiran yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) dalam konteks masalahnya secara keseluruhan. Untuk itu, karena berupa penelitian kualitatif, menurut Lexi J. Maleong (Lexi J. Meleong, 2002: 189), maka langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa datanya adalah melalui pemrosesan (*unityzing*, kategorisasi, dan penafsiran data). Namun secara lebih rinci, menurut Neong Muhadjir (Neong Muhadjir, 2002: 43-40), uraian ringkas mengenai langkah-langkah analisisnya adalah meliputi:

- a. Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan (*menginventarisir*) data mengenai konsep “Pembangunan Masyarakat Islam Menurut Gus Dur” sebanyak-banyaknya.
- b. Reduksi data, memilih dan memilah data disesuaikan dengan bahasan penelitian.
- c. Unitasi data, dalam tahapan ini data kemudian dikelompokkan berdasarkan pada kerangka pemikiran.
- d. Kategorisasi data, dalam tahap ini data-data disusun berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun sebelumnya.
- e. Penafsiran data, pada tahap ini data yang ada kemudian diinterpretasi melalui analisis logis dengan cara induktif-deduktif berdasarkan pada teori-teori.

Penarikan kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam menentukan penilaian terhadap data-data yang telah ditemukan, dibahas, dan dianalisis selama penelitian.